

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU TAHUN 2014 DI KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Rachmad Budianto¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. Untuk menguji hipotesis digunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelurahan simpang pasir kecamatan palaran sebanyak 4.614 orang. Jadi, di dalam menentukan sampel diambil sebanyak 10 % dari populasi yaitu 98 orang yang diambil dengan menggunakan tehnik random sampling (acak sederhana). Selanjutnya untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data seperti observasi, penyebaran angket dan wawancara. Selanjutnya tehnik analisis data yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan menggunakan skala likert 3 jenjang. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat dari perhitungan angka korelasi antara kedua variable adalah sebesar 0,167 dengan nilai probabilitasnya 0,050 dinyatakan sangat lemah dan dengan nilai R positif. Kemudian dalam uji t diperoleh hasil t_{test} sebesar 1.664. Karena $P\text{-value (0,099)} < \alpha (0,01)$, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh konstanta terhadap hasil partisipasi politik. Dengan kecermatan prediksi S_y sebesar $1,20683 \leq SE_{est}$ sebesar 2,22130, sehingga model regresi tidak lebih bagus dalam bertindak sebagai predictor pendidikan politik daripada rata-rata pendidikan itu sendiri dan Koefisien determinasi sebesar 0,028, dengan demikian pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Kelurahan Simpang Pasir sebesar 2,8%.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi masyarakat, Pemilu

Pendahuluan

Memahami pendidikan politik di masyarakat merupakan hal yang sangat menarik untuk diketahui. Karena pendidikan politik itu merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: budirahmad21@gmail.com

Seperti yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pasal tersebut jelas dikatakan bahwa partai politik berhak memberikan pendidikan politik kepada setiap warga Negara dan setiap warga Negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat, disini partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, maka masyarakat mulai memahami apa itu politik dan pendidikan politik. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum.

Dalam setiap Pemilu, masalah Golongan Putih (Golput) sering menjadi wacana yang hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan atau trend peningkatan jumlah Golput dalam setiap pemilihan. Bahkan Golput adalah jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar. Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kitaran 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kitaran 40 persen.

Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen. Besar kecilnya dan maksimal tidaknya jumlah golput akan sangat tergantung dari upaya yang dilakukan.

Pendidikan Politik

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik (1999:117) bahwa Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Fungsi Pendidikan Politik

1. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaan.
2. Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Unsur-Unsur Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik. Unsur-unsur itu mencakup;

- a. Nilai-nilai politik, yang didefinisikan oleh Frans Bona Sihombing (1984:27) sebagai;
 1. Seperangkat taksiran atau perhitungan yang diberikan atas kebijakan- kebijakan politik.
 2. Kebijakan-kebijakan yang telah ditaksirkan tersebut dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan politik, sehingga menimbulkan pertanyaan; tindakan- tindakan politik apa saja yang seharusnya terlaksana.
 3. Tindakan-tindakan politik yang seharusnya terlaksana tersebut ditingkatkan menjadi suatu keharusan politik. Keharusan politik dalam arti mempertimbangkan melalui apa yang baik dan apa yang benar itu berakhir dengan suatu keputusan bahwa keharusan politik tersebut harus terlaksana karena memang itulah sebaiknya.
 4. Yang sebaiknya harus terlaksana itu bersifat memajukan
 5. Yang sebaiknya harus terlaksana dan memajukan itu harus dapat diterapkan dalam bentuk tingkah laku yang ditentukan oleh sifat kebudayaan dari suatu bangsa.
 6. Penerapan dalam bentuk tingkah laku itu menimbulkan tingkatan perubahan yang berfaedah.
 7. Perubahan yang berfaedah itu meliputi apa saja yang mungkin terpenting dari suatu kepentingan kemungkinan politik.
- b. Pengetahuan politik.

Jack Dennis merumuskan pengetahuan politik dalam tiga variabel, yaitu; pengetahuan tentang pemerintah, pengetahuan tentang aturan main politik, dan pengetahuan tentang lingkungan dan masyarakat. (Suwondo, 1998:11) Sementara itu, Kurniati Negara (1993:2) berpendapat bahwa “pengetahuan politik berarti segala yang diketahui berkenaan dengan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, yang meliputi pengetahuan tentang tujuan negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lain”.

- c. Sikap politik

Menurut Sudijono Sastroatmojo (1995:4), sikap politik adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan aktivitas, akan tetapi baru merupakan suatu kecenderungan dari suatu sikap tertentu, dan dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan objek-objek yang dimaksud. Menurut Alfian, sikap dan tingkah laku politik adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap suatu

keadaan. Kalau seseorang merasa terdorong untuk merubah suasana lingkungan yang sudah jauh dari demokratis menjadi lebih demokratis, itupun akan mencerminkan sikap dan tingkah laku politiknya.

Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Bentuk Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira (2004:56) dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.

Pentingnya Pendidikan Politik

Pentingnya pendidikan politik ini juga di muat dalam UU No. 2/2008 (dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008: 233) menurut UU No. 2/2008 tentang partai politik, pasal 31 dikemukakan partai politik melakukan pendidikan politik :

- 1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.

Landasan Pendidikan Politik

Landasan pokok pendidikan politik yang dipergunakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan politik ialah landasan yang pada prinsipnya telah mendasari kehidupan nasional bangsa Indonesia. Namun selain itu secara khusus dalam pendidikan politik ini landasan pokok yang umum itu disertai pula oleh landasan kesejahteraan (jiwa, semangat dan tekad perjuangan) yang baik secara potensial maupun secara nyata memerlukan dasar untuk mewujudkannya terutama yang berkaitan dengan patriotisme, nasionalisme serta idealisme.

Landasan pokok itu ialah sebagai berikut ini:

1. Landasan ideologi : Pancasila
2. Landasan konstitusional: UUD'45
3. Landasan operasional : GBHN
4. Landasan historis : Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945

Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Masyarakat

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran serta kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Menurut Aristoteles (dalam Ng. Philipus dan Nurul Aini, 2004:89) selama manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*) selama itu kita menemukan politik. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa setiap manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan politik seperti bagaimana kita menyatukan perbedaan-perbedaan dalam masalah pelaksanaan politik.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Syarat Tercapainya Partisipasi

Adapun menurut Suryo Subroto (2000:79) "Terdapat syarat tercapainya partisipasi yaitu:

1. Tersedianya waktu untuk berpartisipasi
2. Orang yang berpartisipasi harus mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi
3. Adanya komunikasi dalam berpartisipasi
4. Tersedianya biaya yang cukup

5. Tidak merugikan pihak lain
6. Keterkaitan anggota dengan tujuan yang akan dicapai

Bentuk Partisipasi

1. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud).
2. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Misalnya partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan penghasilan
5. Lamanya tinggal

Pemilu

Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Dan Ali Moertopo mendefinisikan pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan”.

Makna Pemilu

1. Perspektif tujuan: sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjamin.
2. Perspektif tingkat perkembangan negara: sebagai alat untuk membenarkan rezim yang berkuasa.
3. Perspektif demokrasi liberal: sebagai upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatif dimana peneliti menghubungkan atau meneliti hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti (Rakhmat, 2007:32).

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel X adalah Pengaruh Pendidikan Politik dan variabel Y adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014.

Hasil Penelitian

Analisis Sub Variabel

1. Variabel Pendidikan Politik

Table Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SMP	1	11,22
2	SMA	6	57,14
3	Perguruan Tinggi	1	31,63
Total		8	100

Data Angket Bulan oktober 2016

Berdasarkan taraf pendidikan, peserta pemilu yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu di Kelurahan Simpang Pasir adalah mayoritas berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 56 orang (57,14 %), disbanding mereka yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 31 orang (31,63 %), pendidikan SMP sebanyak 11 oarang (11,22 %) dan tidak ada yang memiliki pendidikan setara SD.

Tabel Distribusi Pengetahuan Politik Responden

No	Kriteria Pengetahuan Politik	Frekuensi	Presentase (%)
1	Baik	25	25,51
2	Cukup	73	74,48
3	Tidak Baik	0	0
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pengetahuan politik masyarakat berada di tingkat yang cukup,dimana presentase menunjukkan angka 74,48% yaitu sebanyak 73 orang, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai politik hanya sebesar 25 orang atau 25,51% saja, sedangkan yang sama sekali tidak mengetahui politik tidak ada. Ini berarti bahwa rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat terhadap politik berada pada tingkat cukup menegtahui politik.

Tabel Distribusi mengenai Sikap Politik Responden

No	Kriteria Sikap Politik	Frekuensi	Presentase (%)
1	Baik	17	17,34
2	Cukup	48	48,98
3	Tidak Baik	33	33,67
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Dari tabel menunjukkan bahwa sikap politik masyarakat pada tingkat tertinggi berada dikriteria cukup baik sebanyak 48 orang (48,98%), masyarakat yang memiliki sikap politik buruk atau tidak baik sebesar 33 orang atau 33,67%, sedangkan masyarakat yang sikap politiknya baik justru ada pada tingkat terendah sebanyak 17 orang (17,34%). Dapat di simpulkan bahwa rata-rata masyarakat memiliki sikap politik yang cukup baik.

Tabel Distribusi berdasarkan Pemahaman mengenai Hak dan Kewajiban Warganegara dalam pemilu

No	Kriteria Pengetahuan Politik	Frekuensi	Presentase (%)
1	Paham	9	19,39
2	Cukup Paham	6	46,94
3	Tidak Paham	3	33,67
Total		8	100

Data Angket Oktober 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak ada pada masyarakat yang cukup paham akan hak warganegara dalam pemilu yaitu sebanyak 46 orang (46,94%), masyarakat yang tidak paham berjumlah 33 orang (33,67%), dan presentase terendah ada pada masyarakat yang paham mengenai hak warganegara dalam pemilu sebanyak 19,39% (19 orang).

Tabel Distribusi Total Mengenai Pendidikan Politik

No	Kriteria Pendidikan Politik	Frekuensi	Presentase (%)
1	Baik	9	9,18
2	Cukup	73	74,48
3	Tidak Baik	16	16,33
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Berdasarkan tabel pendidikan politik responden mayoritas berada pada criteria cukup baik sebesar 73 orang (74,49%), masyarakat yang memiliki pendidikan politik yang buruk atau tidak baik sebesar 16 orang

(16,33%), sedangkan yang memiliki pendidikan politik yang baik berada pada jumlah yang terendah yaitu sebesar 9 orang (9,18%).

Peneliti berasumsi bahwa pendidikan politik yang baik mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang karena bila seseorang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik dan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan cenderung mau atau berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu di daerahnya. Sebaliknya bila seseorang mempunyai tingkat pendidikan politik buruk dan tingkat pengetahuan kurang maka orang tersebut akan terkesan cuek dan tidak mau tahu tentang partisipasi dalam politik khususnya ikut menyukseskan pemilu.

Pengetahuan tidak terbatas harus diperoleh melalui pendidikan formal namun dapat juga melalui pendidikan non formal, seperti media massa, seminar dan lain sebagainya. Angell (dalam Ross, 1967: 130) Dikatakan bahwa pendidikan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa seseorang yang memiliki pendidikan tinggi tidak berarti mutlak akan mau dan aktif dalam setiap melaksanakan pemilu.

2. Variabel Partisipasi Masyarakat

Tabel Distribusi mengenai Kondisi Psikologis Responden

No	Kondisi Psikologis	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Mampu	54	55,10
2	Cukup Mampu	42	42,86
3	Tidak Mampu	2	2,04
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Data tabel diatas menjelaskan bahwa presentasi terbanyak di peroleh jawaban masyarakat yang mampu sebesar 55,10% (54 orang), sedangkan masyarakat yang cukup mampu sebesar 42,86% dan hanya 2 orang menjawab tidak mampu. Hal ini menunjukan rata-rata masyarakat mampu secara fisik dan mental untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tabel Distribusi mengenai Pemberian Suara Responden

No	Kriteria Pemberian suara	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Sering	19	19,39
2	Jarang	67	68,38
3	Tidak Pernah	12	12,24
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa sebesar 67 orang dari 98 orang yang dipilih menjadi responden menjawab jarang ikut dalam pemberian hak suara seperti musyawarah, pemilihan RT atau pemilu yang telah lewat. Dan ada sebanyak 19 orang sering terlibat dalam pemberian hak suara, sementara 12 orang menjawab tidak pernah memberikan suara atau GOLPUT dengan berbagai alasan.

Tabel Distribusi Mengenai Kemauan Responden dalam mengikuti pemilu

No	Kriteria Kemauan Responden	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Tinggi	33	33,67
2	Sedang	65	66,33
3	Rendah	0	0
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Data tabel diatas menjelaskan rata-rata masyarakat memiliki tingkat kemauan yang sedang dalam mengikuti pemilu yaitu sebesar 65 orang (66,33%), sedangkan sebesar 17 orang (17,35 %) menjawab sangat berminat, dan tidak ada masyarakat yang tidak mau mengikuti pemilu. Hal ini juga menjelaskan masyarakat memiliki kemauan yang cukup dalam mengikuti pemilu di karenakan beberapa alasan yang mendasari kemauan tersebut.

Tabel Distribusi mengenai Kesempatan Responden dalam mengikuti pemilu

No	Jawaban	Jumlah (n)	Presentasi (%)
1	Sering	14	14,29
2	Kadang-kadang	49	50
3	Tidak pernah	35	35,71
Total		98	100

Data angket oktober 2016

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan baik hanya sebesar 14 orang atau 14,29%, sedang kan mereka yang hanya kadang-kadang memiliki kesempatan berada pada jumlah terbanyak yaitu 49 orang, sisanya adalah masyarakat yang tidak memiliki kesempatan sebesar 35 orang, cukup banyak untuk masyarakat yang rata-rata terdaftar menjadi DPT.

Tabel Distribusi Total mengenai Partisipasi Politik

No	Kriteria Partisipasi Politik	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Tinggi	32	32,65
2	Sedang	54	55,10
3	Rendah	12	12,24
Total		98	100

Data Angket Oktober 2016

Ditinjau dari jumlah partisipasi politik di kelurahan simpang pasir rata-rata masyarakat berada pada kriteria sedang sebesar 54 orang (55,10%), masyarakat yang termasuk kriteria tinggi sebanyak 32 orang (32,65), dan kriteria rendah sebanyak 12 orang (12,24%). Peneliti berasumsi bahwa para responden yang pernah mengikuti pemilu tentu memiliki pengalaman untuk dijadikan pelajaran sehingga pengetahuan yang didapat pun bertambah, sedang kan responden belum pernah berpartisipasi serta baru pertama kali menyalurkan partisipasinya tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan pelajaran sehingga pengetahuan yang dimilikinya pun minim.

Para responden yang pernah memilih lebih dari satu kali serta mengetahui manfaat partisipasi dalam pemilu tentu memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu sendiri dan akan mengaplikasikannya berdasarkan pengalaman yang telah didapat sebelumnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengalaman dalam pemilu yang responden alami akan mempengaruhi pengetahuan responden itu sendiri untuk ikut berpartisipasi, Untuk berpartisipasi setiap individu di pengaruhi oleh faktor- faktor yang dapat mendorong partisipasi itu terjadi. Hal tersebut senada dengan pendapat Holil (1980: 10) bahwa partisipasi dapat dipengaruhi oleh Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.

Analisis Variabel

1. Korelasi *Product Moment*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variable yaitu variable Pendidikan Politik (X) dengan Variabel Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir (Y). Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat dilihat bahwa angka korelasi antara kedua variable adalah sebesar 0.167 dengan nilai probabilitasnya 0,050 yang menyatakan bahwa hubungan antara variable pendidikan politik dan partisipasi politik secara signifikan sangat lemah. Tanda Positif pada nilai R menyatakan bahwa semakin tingginya pendidikan

politik, maka memungkinkan semakin besar partisipasi politik di masyarakat.

2. Regresi linier

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variable pendidikan politik (X) dengan variable partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 (Y), dari perhitungan diperoleh hasil berikut $a=10.094, b=0,311$, dengan demikian persamaan regresinya adalah $Y=10.094 + 0,311X$.

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linier tersebut signifikan atau tidak, maka perlu di cek dengan F_{test} dan di peroleh hasil F_{test} sebesar 2.770 serta $P-value$ sebesar (0,099). Karena $P-value(0,099) < \alpha (0,1)$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah tepat digunakan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya maka harus melihat besarnya harga b yaitu 0,311. Agar harga b dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut, perlu dilakukan uji t_{test} , kemudian di peroleh hasil t_{test} sebesar 1.664. Karena $P-value (0,099) < \alpha (0,01)$, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh konstanta terhadap hasil partisipasi politik. Dengan harga a sebesar 10,094 menyatakan bahwa jika tidak ada pendidikan politik maka partisipasi politiknya adalah sebesar 10,094 dan harga b sebesar 0,311 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 pendidikan politik akan meningkatkan partisipasi politik sebesar 0,311.

Dari perhitungan diatas dapat di jelaskan pula bahwa hipotesis alternatif atau H_a yaitu adanya pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Kelurahan Simpang Pasir.

3. Kecermatan Prediksi

Untuk Mengetahui kecermatan prediksi regresi linier tersebut maka dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi dari Y (S_y) dengan *Standard error of estimate* (SE_{est}). Dalam perhitungan di peroleh hasil yaitu standar deviasi sebesar 1,20683 dan *standard error of estimate* 2,22130. Dengan demikian, karena *Standard error of estimate* adalah 2,22130 lebih besar daripada standar deviasi pendidikan politik yaitu sebesar 1,20683, maka model regresi tidak lebih bagus dalam bertindak sebagai predictor pendidikan politik daripada rata-rata pendidikan itu sendiri.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi sebesar 0,028, dengan demikian pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Kelurahan Simpang Pasir sebesar 2,8%. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Kelurahan Simpang Pasir sebesar 2,8 % dipengaruhi oleh pendidikan politik masyarakat Simpang pasir. Sedangkan

sisanya sebesar 97,2% disebabkan oleh faktor lain di luar variabel pendidikan politik.

Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi

Hal-hal lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 ialah; Pertama karena masyarakat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) enggan pergi ke kelurahan terdekat dan melapor agar bisa terdaftar sebagai DPT. Kedua karena para pemilih yang sudah mendapat undangan untuk mencoblos di daerahnya mempunyai urusan mendadak diluar kota atau sakit. Ketiga karena ada masyarakat yang menilai bahwa partai peserta pemilu tidak ada yang bisa menampung aspirasi para masyarakat dan caleg, capres dan cawapresnya tidak sesuai dengan kriteria mereka. Keempat tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sebelumnya yang menyebabkan mereka enggan pergi ke TPS untuk memilih. Kelima karena kurangnya kinerja pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Banwaslu yang kurang meneliti DPT di daerahnya masing-masing.

Dari kelima faktor yang menyebabkan golput pada tahun 2014, point keempat menjadi hal menjadi alasan yang cukup bagi masyarakat untuk memilih golput. mengapa masyarakat mulai tidak percaya pada pemerintah/elite-politik yang berada di MPR/DPR sana. Dimulai dari banyaknya pemberitaan-pemberitaan tentang skandal kasus-kasus yang menimpa para elite politik tersebut, korupsi di berbagai kementerian makin menambah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Kesimpulan

1. Diketahui pada variabel X skor terendah terdapat pada indikator sikap politik responden sebesar 17 orang yang berkriteria baik, dan skor tertinggi terdapat pada indikator pengetahuan politik responden sebesar 73 orang atau 73,48% masyarakat cukup mengetahui tentang pendidikan politik. Dengan demikian jumlah masyarakat yang lebih tinggi pada kriteria cukup memberikan pengaruh terhadap sikap politik masyarakat yang hanya 17,34%.
2. Sedangkan pada variabel Y skor terendah terdapat pada indikator kondisi psikologis responden sebesar 2 orang dalam kriteria tidak mampu, skor tertinggi terdapat pada indikator pemberian suara responden sebesar 67 orang dalam kriteria jarang. Seiring dengan cukupnya pendidikan politik dan rendahnya sikap politik masyarakat mempengaruhi pemberian suara masyarakat yang hanya sebesar 68,38% pada setiap partisipasi, jadi responden kurang memiliki pendidikan politik yang baik mengakibatkan tidak berkembangnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya menyalurkan partisipasi pada pemilihan umum.

Saran

1. Diharapkan untuk parpol dan KPU dapat lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan politik serta memberikan pendidikan politik sejak dini agar masyarakat lebih memahami makna politik, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam memberikan suara pada pemilu. Sosialisai politik harus terus di tingkatkan, baik melalui media-media ataupun kampanye partai, kader pemilu lebih di perkenalkan secara rinci sehingga masyarakat lebih paham dan mengetahui visi misi setiap kader.
2. Masyarakat juga diharapkan mau untuk terus menggali informasi serta pengetahuan tentang pentingnya pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu sehingga rasa simpati untuk berpartisipasi pun muncul dan masyarakat dapat berperan langsung dalam setiap pemilihan yang ada serta mengontrol jalannya pemilu dengan baik, karena masyarakat merupakan kontrol sosial yang mampu membatasi pengaruh buruk politik dan oknumnya.

DaftarPustaka

- Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004) *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar* Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Philipus, Ng Dan Aini, Nurul. (2004). *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rakhmat. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi, Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sihombing, Frans Bona. 1984. *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Dokumen-Dokumen:

Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda